

PENGATURAN MIGRASI GLOBAL MEMPRESENTASIKAN NEOKOLONIALISME: RWANDA ASYLUM PLAN

SKRIPSI

*Diajukan guna memenuhi salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik pada
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik
Universitas Andalas*

Oleh:

FHADIL AZIZ

2110853014



**DEPARTEMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS**

2026

ABSTRAK

Dinamika migrasi global, yang ditandai oleh rekor jumlah pengungsi melebihi 117 juta jiwa akibat konflik bersenjata, krisis politik, perubahan iklim, dan kesenjangan ekonomi, semakin menunjukkan ketimpangan struktural dalam tata kelola internasional. Rwanda Asylum Plan, sebagai kerjasama bilateral antara Inggris dan Rwanda yang diumumkan pada April 2022 dan dibatalkan pada Juli 2024, menjadi kasus representatif dari strategi eksternalisasi migrasi oleh negara Global North. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan tersebut mereproduksi praktik neokolonialisme melalui relasi kuasa asimetris antara Inggris dan Rwanda. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan studi kasus, data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka berupa dokumen resmi, laporan UNHCR, perjanjian bilateral, serta literatur akademik terkait dan menggunakan teori neokolonialisme untuk menganalisis penelitian ini. Temuan utama menunjukkan bahwa Rwanda Asylum Plan ini bukan hanya mekanisme pengalihan tanggung jawab pemrosesan suaka, melainkan bentuk dominasi tidak langsung yang memanfaatkan insentif finansial (seperti transfer dana £120 juta awal hingga total ratusan juta pound) sebagai “kredit berputar”, memperkuat kedaulatan hampa Rwanda, kooptasi elite lokal, serta kontrol administratif Inggris melalui pengawasan institusional. Kebijakan ini pada akhirnya memperburuk ketidaksetaraan global dan melanggengkan warisan kolonial dalam pengaturan migrasi modern.

Kata Kunci: Migrasi global, neokolonialisme, Rwanda Asylum Plan, eksternalisasi migrasi, relasi kuasa Global North-Global South, Inggris, Rwanda

ABSTRACT

Global migration dynamics, characterized by a record exceeding 117 million displaced persons due to armed conflicts, political crises, climate change, and economic disparities,

increasingly reveal structural inequalities in international governance. The Rwanda Asylum Plan, a bilateral partnership between the UK and Rwanda announced in April 2022 and cancelled in July 2024, exemplifies migration externalization strategies by Global North states. This study aims to examine how the policy reproduces neocolonial practices through asymmetric power relations between the UK and Rwanda. Employing a qualitative approach with descriptive methods and case study design, secondary data were gathered via library research from official documents, UNHCR reports, bilateral agreements, and relevant academic literature and also using the neocolonialism theory for analysis this study. Key findings indicate that the plan transcends mere offloading of asylum processing responsibilities, constituting indirect domination utilizing financial incentives (initial £120 million transfer escalating to hundreds of millions in pounds) as “revolving credit”, reinforcing Rwanda's nominal sovereignty, local elite co-optation, and UK administrative control via institutional oversight. Ultimately, this policy exacerbates global inequalities and perpetuates colonial legacies in modern migration governance.

Keywords: *Global migration, Neocolonialism, Rwanda Asylum Plan, Migration externalization, Global North-South power relations, United Kingdom, Rwanda*